



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR: KP.01.02/A.IV/6985/2023

TENTANG

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

DENGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3187/M.SM.01.00/2023 tanggal 22 November 2023 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini disampaikan:

1. Materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT dalam seleksi CPNS disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada **lampiran** pengumuman ini.
2. Seluruh peserta seleksi kompetensi bidang dengan CAT agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pelaksanaan CAT sesuai kompetensi jabatannya.
3. Peserta agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
5. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sama sekali tidak dipungut biaya.
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui:
 - a. Halo Kemkes 1500567 (pukul 07.00 – 23.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
 - b. Email casn@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2023.

Demikian pengumuman materi pokok soal seleksi kompetensi dengan CAT dalam penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 24 November 2023
an. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia
Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023,

TTD

Hendrastuti Pertiwi



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3187/M.SM.01.00/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan
CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran
2023

22 November 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berakhir, tahap seleksi pengadaan PNS selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2023 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. PANSELNAS memberikan Materi Pokok Soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Rini Widyantini

Tembusan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Menteri PANRB;
2. Plt. Kepala BKN;
3. Kepala BPKP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR



DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS 2023

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Analisis Legislatif Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
		2 Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
		Kemampuan Khusus:
		1 UU MD3
		2 Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
		3 Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
2	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	4 Konsep dasar, teknik dan metode analisis
		5 Konsep analisis deskriptif
		6 Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
		7 Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis
		Kemampuan Umum:
		1 Penyelenggaraan Negara
		2 Kelembagaan DPR dan DPD
3	Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama	3 Manajemen ASN
		Kemampuan Khusus:
		1 Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD
		2 JF Analisis Pemantauan
		3 Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
		Kemampuan Umum:
		1 Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4	Analisis Perkara Peradilan	2 Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3 Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		4 Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2 Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3 Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
5	Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama	4 Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
		Kemampuan Umum:
		1 Pasal 24 UUD 1945
		2 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
		3 UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		4 UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
		5 UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)
		6 UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
		7 UU 30/2014 (Peradilan TUN)
		8 UU 31/1997 (Peradilan Militer)
		9 UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
		10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
		11 UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
		12 UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
		13 UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
		14 UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
		15 UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
		16 UU 3/2006 (Mahkamah Syariah)
		Kemampuan Khusus:
		1 Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
		2 Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
		3 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
		4 Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
		5 Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
		6 KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
		7 Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
		8 Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
9 Sistem pembuktian dalam perkara pidana		
10 Sistem pembuktian dalam perkara perdata		
11 Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)		
12 Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)		
13 Bantuan hukum (Posbakum)		
14 Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)		
15 Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)		
5	Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
		2 Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
		3 Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
4 Pengenalan kelembagaan PPATK		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Kebijakan Aparatur Sipil Negara
		6 Kebijakan Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
		2 Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
		3 Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
		4 Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
		5 Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
		6 Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
		7 Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
6	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2 Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
		Kompetensi Khusus:
		1 Kelembagaan DPR
		2 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
		3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
7	Dosen Asisten Ahli	1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
		Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi:
		2 a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.
		Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek:
		3 a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.
		Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek:
		4 a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.
8	Dosen Lektor	1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
		Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi:
		2 a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.
		Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek:
		3 a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.
		Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek:
		4 a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.
9	Jaksa Ahli Pertama	Pengetahuan Umum:
		1 Sosiologi dan Budaya Dasar
		2 Kriminologi
		3 Filsafat Hukum
		4 Argumentasi Hukum
		5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
		6 Statistika Dasar
		7 Kesehatan Dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Asas-Asas Hukum Pidana
		2 Hukum Pidana
		3 Hukum Acara Pidana
		4 Hukum Pidana Khusus
		5 Hukum Pidana Internasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Kemahiran Litigasi
		7 Hukum Perjanjian Internasional
		8 Hukum dan HAM
		9 Hukum Perdata
		10 Hukum Waris Perdata
		11 Hukum Perjanjian
		12 Hukum Acara Perdata
		13 Hukum Acara Tata Usaha Negara
		14 Hukum Tata Negara
		15 Hukum Adat
		16 Ilmu Negara
		17 Pengantar Ilmu Hukum
		18 Hukum Hak Kekayaan Intelektual
		19 Hukum Ketenagakerjaan
		20 Hukum Otonomi Daerah dan Desa
		21 Hukum Perusahaan
		22 Hukum Agraria
		23 Hukum Internasional
		24 Hukum dan Masyarakat
		25 Hukum Laut Internasional
		26 Etika dan Tanggung Jawab Profesi
10	Peneliti Ahli Muda	Kompetensi Umum: 1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika. 2 Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi 3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI. 4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian Kompetensi Khusus: Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, 1 kualitatif, dan mixed method); Invention, Innovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian. Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan 2 proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian 3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian 4 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan. 5 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
11	Pengelola Penanganan Perkara	Kemampuan Umum: 1 Pancasila 2 Kewarganegaraan 3 Pengantar Ilmu Hukum 4 Pengantar Hukum Indonesia 5 Geografi 6 Ekonomi 7 Sejarah 8 Sosiologi 9 Seni dan Budaya 10 Olahraga 11 Politik 12 Agama 13 Teknologi Kemampuan Khusus: 1 Perundang-Undangan tentang Kejaksaan 2 Administrasi Data 3 Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data 4 Penyusunan Laporan 5 Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana 6 Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata
12	Penjaga Tahanan	Kemampuan Umum: 1 Pancasila 2 Kewarganegaraan 3 Pengantar Ilmu Hukum 4 Pengantar Hukum Indonesia 5 Geografi 6 Ekonomi 7 Sejarah 8 Sosiologi 9 Seni dan Budaya 10 Olahraga 11 Politik 12 Agama 13 Teknologi Kemampuan Khusus: 1 Perundang-Undangan tentang Kejaksaan 2 Administrasi Data 3 Pengelolaan Sistem Keamanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Penyusunan Laporan 5 Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana 6 Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata
13	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi 2 Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 3 Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kompetensi Khusus: 1 Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi 2 Pelaksanaan Pelacakan Aset 3 Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan 4 Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik 5 Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK 6 Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK 7 Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia 2 Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan Kompetensi Khusus: 1 Kelembagaan DPR 2 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI 3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
15	Petugas Barang Bukti	Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan Nasional 2 Fungsi Pengelolaan Barang Bukti 3 Uraian Tugas 4 Sistem Informasi 5 Manajemen 6 Administrasi Data 7 Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data Kompetensi Khusus: 1 Aturan Penggunaan 2 Aturan Pengelolaan 3 Identifikasi Data 4 Integrasi Data 5 Analisa Data 6 Hukum Acara Pidana 7 Hukum Acara Perdata 8 Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan 9 Penyusunan Laporan dan Layanan
16	Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terampil	Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2 Pengelolaan Dukungan Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3 Pengamanan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
17	Pranata Peradilan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pasal 24 UUD 1945 2 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009 4 UU 11/2012 5 UU 2/1986 jo. 49/2009 6 UU 7/1989 jo. UU 3/2006 7 UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009 8 UU 30/2014 9 UU 31/1997 10 Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik) Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan 2 Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN 3 KUHP, KUHPperdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPperdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 4 Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN 5 Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin) 6 Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan 7 Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231122PHOR

